

ANALISA TERHADAP BATASAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR *NOMINEE* DALAM PERSEROAN TERBATAS

SUGONDO

ABSTRACT

The assignment of nominee director in a Limited Liability Company becomes one of the options which is currently chosen nowadays. Nominee director is someone who appointed as a director, or his name is borrowed by a certain party, and directed to run a company in accordance with the direction of those who appointed him/her and borrowed his/her name. In terms of a Director in his/her capacity as Nominee, the regulation for this practice continues to be regulated as for the non-nominee director as stated in the Indonesia Law Number 40 of Year 2007 regarding the Limited Liability Company. A nominee Director has the same responsibility as that of a non-nominee director, including full responsibility for the company's damages in case of the nominee director is guilty or found negligent in performing his/her duties. This is closely related to the implementation of business judgment rule principle, especially in case that the nominee director must be able to prove that in managing the company, he/she with the principle of prudent man rule always prioritizes the standard of due of care, due of loyalty, and the principle of no conflict of interest. The nominee director is required to make sure that the interest of company must be put in the first priority for whatever reason, and paired with the interests of the minority shareholders and the stakeholders.

Keywords: Nominee Director, Responsibility, Limited Liability Company

I. Pendahuluan

Perseroan Terbatas¹ sebagai bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis,² merupakan badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.³

¹ Lihat I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2005), hlm. 1. Bandingkan dengan P.P.S. Gogna, *A Textbook of Company Law*, (Ram Nagar, New Delhi: S. Chand & Company Ltd., 2007), hlm. 9.

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 35.

³ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPT.

Pelaksanaan pengurusan sehari-hari dijalankan oleh organ, yang memiliki fungsi pengurusan dalam Perseroan sebagaimana kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) dan lebih lanjut dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang dikenal dengan sebutan Direksi.⁴

Adapun dalam praktik belakangan ini, adalah praktik penggunaan *nominee*, dimana hal ini berarti ada seseorang yang memakai nama atau identitas orang lain untuk dicantumkan dalam akta perusahaan. Penggunaan *nominee* masih dimungkinkan terjadi walaupun ketentuan UUPT telah mensyaratkan kriteria yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi pengurus PT atau untuk menjadi pemegang saham PT.⁵ *Nominee* tidak lagi hanya digunakan dalam penunjukan untuk menjadi pemegang saham dalam suatu PT⁶, namun juga telah marak di dalam pengangkatan sebagai anggota Direksi dan/atau Komisaris PT.

Adapun salah satu kasus hukum di Indonesia sebagai referensi terkait dengan tren penggunaan *nominee* dalam kepengurusan PT, yakni kasus Sisminbakum KemenkumHAM yang melibatkan PT. SRD. Yohannes Waworuntu, tercatat sebagai Direktur Utama SRD, berdasarkan dokumen testimoninya yang pernah disampaikan di hadapan Komisi III DPR RI, menguraikan mengenai praktik *nominee* dalam struktur kepengurusan SRD.⁷

Dalam kaitan dengan praktik *nominee* ini, yang meskipun secara legal hal tersebut tidak dapat dibenarkan, akan tetapi masih saja bisa ditemukan praktik-

⁴ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 17. Lihat lebih lanjut uraian Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 5 No. 3, Desember 2007), hlm. 15.

⁵ Lihat Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 173-174.” Sedangkan Stephen Griffin dalam *Company Law: Fundamental Principles*, (United Kingdom: Pearson Education Limited, 2000), cenderung menggunakan istilah “*a puppet board of directors*” yang akan menjalankan jabatannya berdasarkan arahan dan instruksi dari “*a shadow director*”.

⁶ Lihat artikel Anonim, “Hartono Tanoe: Saya Bukan Pejabat SRD”, dapat diakses di http://vibizdaily.com/detail/Polhukam/2009/06/30/hartono_tanoe_saya_bukan_pejabat_srd, terakhir kali diakses pada tanggal 11 Juni 2012.

⁷ Lihat lebih lanjut artikel Priyono B. Sumbogo, “Cerita Direktur Utama Yang Divonis”, Nomor 45, Edisi 07-13 Maret 2011, dapat diakses di <http://www.forumkeadilan.com/forum-utama.php?tid=191>, terakhir kali diakses pada tanggal 1 Mei 2012.

praktik semacam itu dalam dunia bisnis.⁸ Hal ini boleh tentu dapat terjadi disebabkan oleh instrumen hukum yang ada cenderung masih ‘lemah’ dan multi tafsir oleh berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda.

Direksi PT jelas bertanggung jawab penuh terhadap jalannya PT yang dikelolanya tersebut, terlepas daripada statusnya yang sebagai *nominee* atau tidak, tentunya akan membawa dampak munculnya implikasi hukum terhadap pertanggungjawaban Direksi PT.⁹

Rumusan permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian tesis ini, yakni:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum dan alasan-alasan eksistensi/keberadaan Direktur *Nominee* dalam pengelolaan PT?
2. Bagaimana batasan-batasan terhadap tanggung jawab dan kewajiban Direktur *Nominee* dalam pengelolaan PT?
3. Apa akibat hukum yang mungkin timbul dalam pengelolaan PT yang dilakukan oleh Direktur *Nominee*?

Selain mempunyai tujuan utama untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat perolehan gelar ‘Magister Kenotariatan’ pada Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penelitian ini juga dimaksudkan :

1. Untuk mengetahui ketentuan yang menjadi rujukan dan dasar hukum eksistensi/keberadaan Direktur *Nominee* dalam pengelolaan PT.
2. Untuk mengetahui sejauh mana batasan tanggung jawab dan kewajiban Direktur *Nominee* dalam pengelolaan PT.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang mungkin timbul dalam pengelolaan PT yang dilakukan oleh Direktur *Nominee*.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (doktrinal), yang dikonsepkan sebagai *law in the books*.¹⁰ Materi penelitian dalam

⁸ Lihat artikel Erwin Siregar, *Membongkar Gurita Perusahaan Milik Ibas Yudhoyono*, dapat diakses di <http://sumbawanews.com/berita/membon...ibas-yudhoyono>, terakhir kali diakses pada tanggal 11 Juni 2012.

⁹ Lihat lebih lanjut uraian Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm.103.

¹⁰ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 127.

tesis ini diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier/tertier atau penunjang.¹¹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan data penelitian akan dikaji lebih lanjut guna mencari hal yang berhubungan dengan permasalahan.

Bahan hukum yang telah disusun secara sistematis akan dianalisa dengan logika ilmiah, yang bersifat kualitatif, dengan tahapan: pengumpulan data, pemilahan data, analisa dan penulisan hasil penelitian. Dengan demikian, diharapkan akan dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjelaskan mengenai batasan tanggung jawab Direktur *Nominee* dalam pengelolaan PT.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Direksi adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan perseroan sebagai subyek hukum yang mandiri.¹² Tugas dan tanggung jawab Direksi serta wewenangnya ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, keberadaan Direksi dalam suatu Perseroan juga diatur berdasarkan undang-undang.¹³

Direksi memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keberhasilan sebuah Perseroan untuk mencapai maksud tujuannya. Dalam hal demikian, para pemegang saham dapat saja dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direktur (khususnya adalah Direktur *Nominee*) yang ditempatkannya dalam jajaran Dewan Direksi.¹⁴

Adapun beberapa persyaratan yang harus dan selayaknya dimiliki oleh seorang individu untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, dapat mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 93 UUPT.

Oleh karena itu, yang layak diangkat menjadi anggota Direksi (*reasonable director*) adalah orang yang tidak diragukan kehati-hatiannya. ... untuk mengukur

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 38. Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 113-114.

¹² Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Pasal 26 tentang Pedoman Jabatan Rangkap, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, tth, hlm. 8.

¹³ Raffles, "Eksistensi dan Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", tth., hlm. 68, sebagaimana dikutip dari I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan: UU dan Peraturan Pelaksana di Bidang Usaha* (Jakarta: Megapoint, 2000).

¹⁴ Retno Wulandari, "*Director's Responsibilities in a Limited Liability Company*", (FW&P, Januari-April 2010), hlm. 26, dapat diakses di http://franswinarta.com/Article-Director's_Responsibilities_in_a_Limited_Liability_Company.pdf, terakhir kali diakses pada tanggal 1 November 2012.

patokan atau standar *reasonable director* ... yang umum dipegang, anggota Direktur tersebut, mampu memperlihatkan tingkat kehati-hatian yang wajar atau yang layak bagi seorang sesuai dengan pengalaman dan kualifikasinya sebagai seorang Direktur.¹⁵

Dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Apabila Direksi terdiri dari lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi. Walaupun demikian, apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya tidak dapat mewakili.¹⁶

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk mengurus perseroan. Dalam tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan itikad baik¹⁷ dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.¹⁸

Tentang kepentingan siapa yang harus dititikberatkan, menurut Schilfgaarde, dalam hal berbicara tentang “kepentingan” dalam PT, sebenarnya banyak kepentingan yang harus diperhatikan. Selain kepentingan pemegang saham dan “kepentingan perseroan sendiri” (yang dinamakannya “*het vennootschap belang*”) masih ada lagi kepentingan lain yang patut diperhatikan, seperti kepentingan para karyawan, kepentingan pihak ketiga dan kepentingan nasional.¹⁹

Direktur *Nominee* adalah seorang Direktur (atau seseorang yang ditunjuk (atau dipinjam namanya) dengan pertimbangan alasan tertentu untuk menduduki

¹⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), (I), hlm. 379.

¹⁶Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1996), (I), hlm. 74. Hal ini tentunya menjadi sedikit berbeda dalam praktik lazim keseharian, dimana di dalam Anggaran Dasar suatu PT umum dicantumkan klausula yang memberikan kewenangan kepada anggota Direksi lain untuk bertindak mewakili kepentingan Perseroan dengan ketidakhadiran Direktur Utama, tanpa diperlukannya suatu pembuktian oleh dan terhadap pihak ketiga. Adapun alasan utamanya adalah agar Perseroan tetap dapat berjalan dan kepentingan Perseroan tidak menjadi terbengkalai apabila harus sampai menunggu kehadiran Direktur Utama.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 80. Lihat juga Detlev F. Vagts, *Basic Corporation Law: Materials-Cases-Text*, (New York: The Foundation Press, Inc., 1989), hlm. 211.

¹⁸Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hlm. 85.

¹⁹Rudhi Prasetya, *Op. cit.*, hlm. 222.

jabatan sebagai anggota Direksi suatu Perseroan) yang ditunjuk oleh dan untuk mewakili kepentingan pihak-pihak tertentu dalam rangka melaksanakan kepengurusan atas Perseroan atau untuk mengendalikan jalannya Perseroan.

Adapun beberapa alasan penunjukan Direksi *Nominee*, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁰

1. Untuk menyembunyikan identitas daripada pemilik atau direktur dalam kenyataannya (pihak *beneficiary*);
2. Untuk tujuannya menyederhanakan struktur dalam perusahaan;
3. Untuk memperoleh fasilitas komersial dalam transaksi bisnis;
4. Untuk kepraktisan dan efisiensi waktu dan biaya dalam praktik kepengurusan perusahaan.

Eksistensi/Keberadaan Direksi sebagai organ pengurus dalam Perseroan Terbatas di negara-negara dengan sistem *Civil Law* dan sistem *Common Law* hampir sama fungsinya. Eksistensi Direksi *Nominee* adalah sedemikian hebatnya di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*. Hal ini tentu berbeda dengan Indonesia dengan warisan sistem hukum bercorak Eropa Kontinental.

Menurut kebanyakan negara yang menganut sistem *Civil Law*, hubungan antara direktur dengan perusahaan adalah bersifat kontraktual. Artinya, sungguhpun antara perusahaan dengan direkturnya tidak terdapat suatu kontrak tertentu, tetapi oleh hukum “dianggap” (fiksi) ada kontrak pemberian kuasa. ... Sebagai konsekuensi yuridisnya, direktur sebagai pemegang kuasa tidak boleh bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. ... Lain halnya hukum di negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon, di mana direktur berkedudukan sebagai agen (*trustee*) dari perusahaan, yang mempunyai tugas serta hubungan *fiduciary*. Dalam hal tersebut, direktur haruslah selalu melakukan “*duty of care*” terhadap perusahaan yang dipimpinnya.²¹

²⁰ Lihat Anonim, “*Why I need a nominee shareholder or/and nominee director?*”, dapat diakses di http://www.asiabs.com/english/english_Company_Parking_Shareholders_and_Directors_155.htm#155, terakhir diakses pada tanggal 30 Juni 2012.

²¹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2004), hlm. 175. Lihat juga artikel Yahya A.Z., “Perbandingan Hukum Tanggung Jawab Direktur (PT) Antara Sistem Hukum *Civil Law* dengan *Common Law*”, 21 Juli

Dilihat dari sudut sifat Perseroan (*corporate nature*), Perseroan adalah merupakan *persoon* yang tidak terlihat, tidak teraba dan artifisial (*invisible intangible and artificial person*). Namun demikian, hukum atau undang-undang memberikan kepadanya untuk menikmati semua hak yang dapat dimiliki dan dinikmati oleh manusia atau *persoon* alamiah (*natural persoon*).²²

Konsep bahwa PT adalah badan hukum melahirkan keberadaan PT sebagai subjek hukum mandiri, dengan keberadaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Keberpisahan ini mengakibatkan bahwa PT mutlak memerlukan Direksi sebagai wakilnya. ... Sebagai sebuah badan hukum, oleh hukum, anggota Direksi ditugaskan untuk mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi yang harus mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan harus manusia atau orang perseorangan. Diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UUPt bahwa: Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”.²³

Konsep *nominee* untuk anggota Direksi mulai dari KUHD/WvK sampai dengan diundangkannya UUPt, baik UUPt 1995 atau yang terbaru di dalam UUPt 2007 belum diatur ataupun dikenal lebih lanjut selain daripada konsep Direksi sebagaimana lazimnya. Apabila dirujuk kepada hukum positif yang ada, yakni UUPt 2007, maka dapat diketahui bahwa tidak ada satu pasal atau ayat pun di dalam UUPt 2007 yang memberikan landasan hukum bagi keberadaan Direksi *Nominee* dalam suatu PT di Indonesia.

Akan tetapi, konsep apapun itu, setiap direktur memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keberlangsungan perusahaan.²⁴

2009, dapat diakses di <http://yahyazein.blogspot.com/2009/07/perbandingan-hukum-tanggung-jawab.html>, terakhir diakses pada tanggal 01 Desember 2012.

²²M. Yahya Harahap, “*Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing The Corporate Veil*”, Artikel Utama pada Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 – No. 3 – Tahun 2007, (II), hlm. 44.

²³Nike K. Rumokoy, “Pertanggungjawaban Perseroan selaku Badan Hukum dalam Kaitannya dengan Gugatan atas Perseroan (dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai Acuan Pembahasan)”, dapat diakses di <http://repo.unsrat.ac.id/48/1/2.Nike.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 27 Juni 2012.

²⁴Lihat lebih lanjut artikel *Financial Supervision Commission*, “*Guidance on the responsibilities and duties of directors under the laws of the Isle of Man*”, (Isle of Man, Agustus 2011), hlm. 2, dapat diakses di <http://www.gov.im/lib/docs/fsc/guidanceontheresponsibilitiesand.pdf>, terakhir kali diakses pada tanggal 1 Desember 2012.

Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan berdasarkan anggaran dasar. Anggaran dasar Perseroan ini wajib dibuat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, untuk anggaran dasar Perseroan Terbatas wajib dibuat sesuai dengan UUPT.²⁵ Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan UUPT, maka yang berlaku adalah UUPT.²⁶

Sebagaimana halnya kewenangan Direksi untuk mengurus Perseroan, maka tidak berbeda pula terhadap Direksi *Nominee* tentunya juga wajib tunduk terhadap peraturan tertulis yang telah ada yang mengatur tentang Direksi secara umum. Dengan demikian, ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Direksi pada umumnya juga akan mengikat terhadap keberadaan Direksi *Nominee*.²⁷

Apabila ditinjau di dalam UUPT, maka tidak akan dan masih belum dapat dijumpai adanya suatu pengaturan terhadap Direktur *Nominee*. Dalam kaitannya dengan kedudukan Direktur *Nominee* ini, mengutip pendapat E. W. Thomas, sebagai berikut:

Direksi *Nominee* adalah fakta yang nyata di dalam kehidupan komersil dan tidak dapat diabaikan. ... Dalam praktik komersil, hubungan antara pihak yang menunjuk dengan direksi *nominee* yang ditunjuknya adalah beragam baik sebagai prinsipal dan agen atau antara majikan dan pekerja. ... Karyawan yang mewakili majikan mereka di dalam jajaran Dewan Direksi adalah hal yang umum dijumpai sebagai contoh keberadaan direksi *nominee* yang akan lebih mudah dalam komunikasi, dan tentunya dalam kasus tertentu dengan menempatkan pula si majikan dari pekerja untuk duduk sebagai direksi *nominee* yang tentu akan bertanggung jawab terhadap setiap tindakannya.²⁸

Akhir-akhir ini, kiranya telah semakin terbuka pembahasan terhadap bagaimana kedudukan dan tanggung jawab daripada Direktur *Nominee*. Akan tetapi, masih seringkali dijumpai bahwa pengaturan mengenai konsep Direktur *Nominee* di dalam *Acts* daripada negara-negara tertentu masih minim. Hal ini

²⁵ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008), (II), hlm. 123.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 126.

²⁷ Lihat juga uraian Binoto Nadapdap, *Op. cit.*, hlm. 24.

²⁸ Justice E W Thomas, “*The Role of Nominee Directors and the Liability of their Appointors*”, dalam Ian M Ramsay (ed.), *Op. cit.*, hlm. 148.

kemudian diperlemah juga bahwa dalam kenyataannya definisi atau pemahaman terhadap terminologi Direktur *Nominee* juga belumlah jelas adanya.

Sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 97 *juncto* Pasal 92 ayat (1) UUPT, bahwa Direksi itu bertanggung jawab terhadap berjalannya pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan demi tercapainya kepentingan Perseroan. Tanggung jawab tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik²⁹. Setiap anggota Direksi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut akan memikul tanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh Perseroan. Apabila Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, maka tanggung jawab tersebut berlaku secara renteng.³⁰

Mengenai tanggung jawab direksi, sesungguhnya dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

1. Tanggung jawab renteng antar sesama anggota direksi.
2. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*.
3. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*.
4. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *ultra vires*.
5. Tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam.³¹

Selain kebijakan yang diambil dalam pengurusan Perseroan berdasar keahlian (*skill*) dan peluang yang tersedia, Direksi juga harus bertitik tolak dari kelaziman dalam dunia usaha (*common business practice*). Akan tetapi, tidak cukup ukurannya hanya praktik kelaziman saja (*common practice*) namun kualitasnya harus praktik kelaziman yang terbaik (*common best practice*).³²

Hal yang mendasar dari tugas Direksi Perseroan adalah menjalankan Perseroan.³³ Ini berarti Direksi harus mempunyai *duty of care and skill*, itikad, kejujuran, dan loyalitas kepada perusahaan.³⁴

²⁹ Lihat lebih lanjut uraian Daniel L. Rottinghaus, Esq., “*A Primer on Board of Directors’ Fiduciary Duties: Knowing What is Expected Of You And Simple Tips For Complying*”, tth., hlm. 2.

³⁰ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 172. Pengecualian terhadap tanggung jawab tersebut apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan pengurusan Perseroan dengan baik, dan memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT.

³¹ Raffles, *Op. cit.*, hlm. 72-73.

³² M. Yahya Harahap, (I), *Op. cit.*, hlm. 348. Lihat lebih lanjut uraian pada hlm. 72-73, dikatakan, “Menurut Penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT, yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat”.

³³ *Ibid.*, hlm. 126.

³⁴ Try Widiyono, (II), *Op. cit.*, hlm. 88.

Berkaitan dengan doktrin *fiduciary duties* ini, layak dikemukakan bahwa dalam praktik, terdapat Direktur Perseroan yang tidak memiliki persyaratan *standard of care*, khususnya yang berkaitan dengan *skill*. Banyak sekali Direktur Perseroan yang dipilih ... dititikberatkan pada “kepatuhan” terhadap pemegang saham. Direktur ini hanya berfungsi sebagai “hiasan” dan pemenuhan perundang-undangan bahwa Perseroan tersebut memiliki Direksi. Sedangkan hakikatnya para Direktur tersebut hanya “boneka” dari para pemegang saham. ... Namun dalam UUPT tidak ada ketentuan yang melarang ... memilih direktur boneka.³⁵

*All directors (whether nominated or otherwise) have fiduciary duties to the companies on whose boards they sit. Such duties are non-derogable and to that extent, in case of a real conflict, a nominee director may be required to put the interests of the company before the interests of the nominating entity.*³⁶ Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan prinsip *fiduciary duty* ini, maka direktur harus lebih mengutamakan kepentingan perseroan terhadap setiap transaksi yang menimbulkan *conflict of interest*.³⁷

Perusahaan yang dalam hal berbentuk Perseroan Terbatas (PT) secara fungsional dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*), baik berbentuk *financial return* bagi para pemegang saham (*shareholders*) maupun *social welfare*.³⁸ Direksi (baik Direktur pada umumnya, atau Direktur *Nominee* sekalipun, tanpa dikecualikan) sebagai organ yang memiliki fungsi dan peranan yang luas seyogianya harus mampu menerapkan nilai-nilai yang telah digariskan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 91.

³⁶ V. Umakanth, “*Stock Options for Nominee Directors*”, 6 Agustus 2008, dapat diakses di <http://indiacorplaw.blogspot.com/2008/08/stock-options-for-nominee-directors.html>, terakhir kali diakses pada tanggal 21 November 2012.

³⁷ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 179. Lihat Susan Watson & Chris Noonan, “*The corporate shield: What happens to directors when companies fail?*”, Business Review (University of Auckland, 2005), hlm. 28, dapat diakses di <http://www.uabr.auckland.ac.nz/files/articles/Volume11/v11i1-the-corporate-shield.pdf>, terakhir kali diakses pada tanggal 12 Oktober 2012, dikatakan, “*As in Salomon v. Salomon & Co Ltd [1897] AC 22 tells us, a company is a separate person at law from those who operate on its behalf and through it; namely its directors, employees and shareholders. But this does not necessarily protect directors from liability; it means only that the liability of directors must be assessed separately from the liability of the company.*”

³⁸ Anonim, “*Tinjauan Kritis Implementasi GCG di Indonesia*”, dapat diakses di <http://legalbanking.wordpress.com/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-kapan-dapat-dilaksanakan/tinjauan-kritis-implementasi-gcg-di-indonesia/>, terakhir kali diakses pada tanggal 2 Juli 2012.

di dalam *Good Corporate Governance* (GCG) dengan berpedoman pada prinsip-prinsip doktrin hukum modern³⁹.

Direktur Perseroan sebagai organ di dalam Perseroan yang memiliki kewenangan dan peranan dominan menjadi salah satu sumber penerapan GCG. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh D. D. Prentice, bahwa, “*We have seen that the role and functions of directors, as the senior decision- makers in companies, are central to corporate governance. However, determining the proper role of directors and ascertaining what types of directors might best suit the needs of companies are not without controversy.*”⁴⁰

Adapun beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip mendasar yang dapat ditemukan dalam praktik GCG adalah sebagai berikut:⁴¹ Keadilan (*Fairness*); Tranparansi (*Transparency*); Akuntabilitas (*accountability*); dan Tanggung jawab (*responsibility*).

Pengelolaan perusahaan yang baik, tidak hanya berarti mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk perusahaan, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial dari perusahaan (*Corporate Social Responsibilities*). Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial tidak merusak lingkungan atau merugikan konsumen karena barang yang cacat. Dalam menjalankan tugasnya ia memiliki “*business judgment rule*”, yaitu ia tidak dapat dituntut karena keputusannya ternyata mendatangkan kerugian pada perusahaan, sepanjang ia mengambil keputusan tersebut dengan penuh kehati-hatian, telah mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Perseroan, beriktikad baik, tidak terdapat kelalaian atau penipuan.⁴²

*The duty of care requires that directors inform themselves of all material information reasonably available before voting on a transaction.*⁴³ Hal ini erat

³⁹Adapun prinsip-prinsip doktrin hukum modern, diantaranya meliputi: *fiduciary duty*, *standard of care*, *self dealing transaction* dan *corporate opportunity*, serta *business judgment rule*.

⁴⁰ D D Prentice, *Op. cit.*, hlm. 7.

⁴¹Lihat juga uraian Retno Wulandari, *loc. cit.*, sebagaimana dikutip dari Ridwan Khairandy & Camelia Malik, “*Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*”, (Yogyakarta: Kreasi Total Media), hlm. 77-85.

⁴²Erman Rajagukguk, “Tanggung Jawab Direksi dan “*Business Judgment Rule*”, (II), dapat diakses di <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3108512.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 18 Juni 2012.

⁴³Nadelle Grossman, *Op. cit.*, hlm. 402, sebagaimana dikutip dari Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, 872 (Del. 1985), salah satu kasus yang diputus oleh *Delaware Supreme Court*.

kaitannya dengan kewajiban Direksi untuk melakukan pengurusan dan memperhatikan Perseroan dengan penuh tanggung jawab dan wajib saksama serta berhati-hati (*prudential duty*).⁴⁴

Keberadaan Direksi adalah untuk mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. ... Oleh karena itu, agar Perseroan tersebut terurus sesuai dengan maksud pendiriannya, maka untuk menjadi Direksi diperlukan persyaratan dan keahlian tertentu. Pendelegasian wewenang dari Perseroan kepada Direksi untuk mengelola Perseroan lazim disebut sebagai *fiduciary duty*.⁴⁵

Dalam kaitannya dengan kewenangan seorang Direktur *Nominee* di dalam bertindak dengan digandengkan terhadap prinsip *Business Judgment Rule*, maka dapat diuraikan bahwa ketentuan umum yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Direktur (yang bukan *nominee*) adalah dapat diterapkan dan berlaku terhadap Direktur *Nominee*.

Business Judgment Rule, adalah aturan bahwa keputusan seorang Direktur adalah sah dan mengikat dan tidak dapat dikesampingkan dan diserang oleh para pemegang saham. Namun “*Business Judgment Rule*” tidak pula melindungi Direktur dalam hal ia melanggar “*duty of loyalty*”. *Business Judgment Rule* hanya melindungi Direktur apabila ia dalam membuat keputusan meyakini bahwa putusan itulah yang terbaik untuk Perseroan, bertindak dengan itikad baik dan penuh kejujuran, tidak untuk kepentingan dirinya sendiri.⁴⁶

Direksi adalah sebagai *fiduciaries* kepada Perseroan dan para pemegang saham. Mereka memikul beban *fiduciary duties of loyalty and care* pada keduanya. Mereka juga memikul *duty of disclosure* dalam hal-hal tertentu. *Fiduciaries* haruslah mengelola rencana investasi mereka berdasarkan ketentuan “*the prudent man rule*”.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, mereka harus menggunakan kehati-hatian, kemampuan, *prudence*, dan *diligence* dalam keadaan sebagaimana lazimnya seorang *prudent man* akan bertindak dalam kapasitas dan tentu sesuai

⁴⁴ M. Yahya Harahap, (I), *Op. cit.*, hlm. 378.

⁴⁵ Try Widiyono, (II), *Op. cit.*, hlm. 41.

⁴⁶ Erman Rajagukguk, (I), *loc. cit.* Bandingkan dengan Chief Justice E Norman Veasey, “*The Defining Tension in Corporate Governance in America*”, dalam Ian M Ramsay (ed.), *Op. cit.*, hlm. 17.

dengan apa yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang dikehendaki sesuai dengan karakter seorang pengusaha.⁴⁷

Direksi tidak akan dilindungi oleh prinsip *Business Judgment Rule* ketika membuat satu kebijakan bisnis apabila mereka memiliki kepentingan pribadi di dalam pengambilan keputusan tersebut atau jika mereka tidak bertindak secara bebas-mandiri atau adanya dominasi tertentu atau motif lain selain daripada tindakan yang dibenarkan oleh perseroan. Kemandirian dapat menjadi satu isu yang kritis dalam menghadapi tuntutan hukum atau dalam tindakan korporasi dimana Direksi dapat dituduh telah didominasi oleh pihak-pihak tertentu, sebagai contoh.⁴⁸

Dari uraian tersebut di atas, dikemukakan bahwa dalam hal Direksi tidak melaksanakan fungsi dan peran tanggung jawabnya secara mandiri (dalam hal ini dimaksudkan adalah Direktur *Nominee*) dan beritikad baik demi kepentingan terbaik Perseroan, atau bahkan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, maka anggota direksi tersebut akan dapat dimintakan pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadi.

Oleh karenanya, adalah sangat penting bagi seorang direktur untuk mengetahui bahwa setiap hasil dari tindakannya akan berdampak secara hukum terhadap dirinya.⁴⁹ Sudah sangat jelas bahwa setiap bagian daripada prinsip *fiduciary duties* itu harus dilaksanakan oleh seorang direktur. Sedangkan pada sisi lain, seorang direktur juga semestinya mengingat bahwa setiap tindakannya akan membawa konsekuensi hukum (termasuk pertanggungjawaban pajak) terhadap dirinya.⁵⁰

Adanya ‘direktur boneka’ (baca Direktur *Nominee*) pada hakikatnya mencederai dan melanggar berbagai doktrin hukum, sebab pemegang saham tidak sepatutnya mempengaruhi kepengurusan yang dijalankan oleh direksi. Apabila pemegang saham telah memengaruhi kepengurusan direksinya⁵¹ sehingga direksi

⁴⁷ Anonim, “*ERISA Fiduciary Responsibility: Fiduciary Reliance on Registered Investment Advisors*”, (California, Multnomah Group Inc.), hlm. 1, dapat diakses di <http://www.thecfdd.com/files/researchtrends/Research10.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 22 Desember 2012.

⁴⁸ Chief Justice E Norman Veasey, *Op. cit.*, hlm. 23.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Lihat lebih lanjut uraian Justice E W Thomas, *Op. cit.*, hlm. 150.

perseroan tersebut melanggar aturan dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap pemegang saham ... dapat diminta untuk bertanggung jawab secara pribadi, sampai harta pribadinya.⁵²

Kemandirian direksi perseroan mutlak diperlukan dalam mengurus perseroan agar dapat menjalankan kepengurusan tersebut sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika direksi perseroan dapat dijadikan alat untuk kepentingan pribadi pemegang saham, maka seharusnya direksi tersebut mengundurkan diri karena berarti direksi tersebut tidak dapat menjalankan prinsip *fiduciary duty* dan *standard of care*.⁵³ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, apabila Direksi telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care*, maka Direksi tersebut telah melanggar *duty of care*-nya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukannya yang melampaui standar kehati-hatian.⁵⁴

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, sama halnya seperti manusia pribadi, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah sifatnya.⁵⁵ Akan tetapi, ia hanya dapat membuat keputusan dan mengubah jenis usahanya melalui orang-orang yang diberikan kewenangan untuk tujuan tersebut, pada umumnya Direksi.⁵⁶

Dalam pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi *Nominee* tentu sangat erat kaitannya dengan komitmen daripada pihak yang namanya ‘dipinjam’ dan diposisikan sebagai Direksi *Nominee* tersebut. Mengenai komitmen untuk menjalankan jabatan fungsionalnya dengan tanpa meng-kebiri kewenangan daripada *beneficiary owner* yang berkepentingan adalah hal yang kemudian menjadi dapat dipertanyakan.⁵⁷

⁵²Try Widiyono, (II), *Op. cit.*, hlm. 92-93.

⁵³*Ibid.*, hlm. 93.

⁵⁴Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 181.

⁵⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 101.

⁵⁶Anonim, “*Directors’ Responsibilities*”, (I), hlm. 2 dapat diakses di http://www.charlesrussell.co.uk/UserFiles/file/pdf/Mergers%20&%20Acquisitions/Directors_Responsibilities.pdf, terakhir kali diakses pada tanggal 8 September 2012.

⁵⁷Lihat lebih lanjut uraian The Companies and Securities Law Review Committee, “*The Duties and Liabilities of Nominee Directors and Alternate Directors: Discussion Paper No. 7*”, hlm. 24, dapat diakses di http://www.takeovers.gov.au/content/Resources/cslrc/cslrc_discussion_paper_no_7.aspx, terakhir kali diakses pada tanggal 2 Juli 2012.

Perihal direktur *nominee* ini dapat dirujuk pada salah satu putusan pengadilan di Ontario, Kanada, oleh *Callaghan C.J.O.C* dalam kasus *PWA Corp v. Gemini Group Automatic Distribution Systems Inc.* [1993], *B.L.R. (2d)* 221 (*Ont. Gen. Div.*), tinjau pada halaman 26.⁵⁸

Wewenang dan tanggung jawab dari seorang direktur *nominee* adalah sama dengan anggota direksi lain pada umumnya. Tugas seorang anggota direksi adalah terhadap Perseroan dimana ia menjabat sebagai direktur. Tidak ada larangan terhadap direktur suatu perusahaan untuk memegang lebih dari 1 (satu) jabatan direksi sepanjang hal tersebut tidak mengarahkan pada konflik kepentingan.⁵⁹

Mengenai penggunaan Direksi ... *nominee* tidaklah diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi jika kita melihat kembali pada ketentuan UUPT mengenai wewenang dan tanggung jawab Direksi ... harus menjalankannya sebaik-baiknya, dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan menerapkan asas kehati-hatian. Sehingga, dalam hal ada Direksi ... lalai melakukan tanggung jawabnya, ... bertanggung jawab penuh secara pribadi dan dapat digugat oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap Direksi atau Dewan Komisaris yang bersangkutan (lihat Pasal 97 ayat (6) jo. Pasal 114 ayat (6) UUPT).⁶⁰

Direktur *Nominee* adalah tidak jarang merupakan karyawan atau pegawai dari pada penunjuknya, dalam hal mereka akan memiliki tugas untuk bertindak dengan penuh loyalitas dan itikad baik terhadap para penunjuknya. Namun bagaimanapun, mereka berisiko melanggar ketentuan hukum dan *fiduciary duties* sebagai anggota Direksi Perseroan dimana mereka ditunjuk apabila tugas

⁵⁸James M. Farley, "Could Pinnocchio Ever be a Director?", (Canada: McCarthy Tétrault, 4 November 2008), dapat diakses di http://www.mccarthy.ca/article_detail.aspx?id=41487, terakhir diakses pada tanggal 4 Juli 2012.

⁵⁹Mary Fulton, *Op. cit.*, hlm. 12.

⁶⁰Diana Kusumasari, "Tercatat Sebagai Direksi/Komisaris/Manajer PT Tapi Tidak Digaji", 03 Januari 2012, dapat diakses di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0ccf5a610da/tercatat-sebagai-direksi-komisaris-manajer-pt-tapi-tidak-digaji>, terakhir diakses pada tanggal 20 Desember 2012.

tanggung jawab tambahan terhadap pihak yang menunjuk mereka bertentangan dengan tugas tanggung jawab terhadap Perseroan.⁶¹

Sekalipun dalam beberapa kasus hukum dikemukakan bahwa seorang direktur *nominee* dapat bertindak untuk kepentingan pihak yang menunjuknya, hal ini hanyalah merupakan perluasan daripada bahwa kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan *duty to act* demi kepentingan terbaik dari perseroan. Seorang direktur tidak diperkenankan untuk memperoleh keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari jabatannya dan juga tidak seharusnya bertindak untuk kepentingan seseorang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan direktur perseroan tersebut.⁶²

Direksi dalam pengurusan dan pengelolaan Perseroan harus senantiasa berpedoman kepada asas-asas pengelolaan perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik. Kepentingan Perseroan harus senantiasa diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.⁶³

Pemegang saham minoritas yang secara posisional jauh lebih lemah apabila dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, sangat sulit ketika harus dihadapkan dengan konspirasi pemegang saham mayoritas, Direksi dan Dewan Komisaris. Hal lain yang turut memperlemah kedudukan pemegang saham minoritas adalah prinsip *persona standi in judicio* (*capacity standing in court or in judgment*), yaitu hak untuk mewakili Perseroan baik di depan maupun di luar pengadilan. Secara normatif, posisi ini hanya terbuka pada pemegang saham mayoritas.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas adalah sebagai berikut:⁶⁴ *Personal Right* (Hak Perseorangan); *Appraisal Right* (Hak atas Penilaian Harga Saham); *Pre-Emptive Right* (Hak Utama); *Derivative Right* (Hak Derivatif); dan *Enqueterrecht Right* (Hak Pemeriksaan).

⁶¹Bryn Davis, "Nominee directors and managing conflicts in M&A transactions: relying on the vibe or an analytical framework?", 24 November 2011, dapat diakses di http://www.minterellison.com/Pub/NL/201111_MAd/, terakhir diakses pada tanggal 4 Oktober 2012.

⁶² Clifford S. Goldfarb, *Op. cit.*, hlm. 4.

⁶³ Lihat lebih lanjut uraian Daniel L. Rottinghaus, Esq., *Op. cit.*, hlm. 2.

⁶⁴ Binoto Nadapdap, *Op. cit.*, hlm. 73, sebagaimana dikutip dari Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 275-336.

Adalah hal yang cukup penting bahwa potensi pertanggungjawaban dari pihak yang menunjuk untuk tindakan yang dilakukan oleh *nominee* yang mereka tunjuk semakin diperluas apabila kepentingan dari pemegang saham minoritas hendak dilindungi secara keseluruhannya. ... dalam keadaan tertentu direktur *nominee* akan bertindak selayaknya demi kepentingan dari sponsor mereka. Ketika hal tersebut dilakukan, maka pihak yang menunjuk mereka tersebut sudah seharusnya bersiap-siap untuk menerima segala tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan oleh perwakilan mereka.⁶⁵

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tentu tidak serta merta memberikan kewenangan yang tidak terbatas bagi pemegang saham minoritas untuk mengintervensi setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Direksi. Dalam kepengurusan Perseroan, pemegang saham (baik mayoritas maupun minoritas) dibatasi kewenangannya oleh kewenangan yang telah diberikan kepada Direksi oleh UUPT maupun anggaran dasar Perseroan.⁶⁶

Sebuah perusahaan harus dapat mengusahakan terjadinya keseimbangan antara kepentingan *shareholders* dengan kepentingan *stakeholders* untuk mempertahankan keberadaannya.⁶⁷

Berkaitan dengan tanggung jawab Direksi ini, perlu dikemukakan bahwa di Indonesia, pemegang saham mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk mengendalikan perusahaan, melalui lembaga RUPS. ... Pada saatnya, mungkin dapat terjadi bahwa Direksi dapat saja menentang keputusan RUPS, jika keputusan RUPS tersebut bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* ataupun melanggar tanggung jawab Direksi yang luas, yakni kepada *stakeholder*.⁶⁸ Dalam hal demikian, seorang Direktur *Nominee* harus mendahulukan kepentingan terbaik dari Perseroan dalam arti seluas-luasnya, pada saat dihadapkan dengan kepentingan para pemegang saham (atau pada khususnya, kepentingan *beneficiary*-nya).

⁶⁵ Justice E W Thomas, *Op. cit.*, hlm. 149.

⁶⁶ Lihat lebih lanjut uraian Try Widiyono, (II), *Op. cit.*, hlm. 118-119.

⁶⁷ Chandra Bowo Nagoro, "Penerapan Prinsip-Prinsip GCG pada Bank BUMN (Studi Kasus pada Bank BRI)", hlm. 52, dapat diakses di <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/371085057.pdf>, terakhir kali diakses pada tanggal 20 November 2012.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 71-73.

Direksi dalam melaksanakan kepengurusan atas Perseroan berdasarkan prinsip *fiduciary duty* harus menjalankan tugasnya sesuai dengan *standard of care*. Dengan standar yang demikian, sekalipun dengan status *Nominee*, Direksi antara lain harus mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap Perseroan.⁶⁹ Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa tanggung jawab Direksi tidak hanya kepada para pemegang saham saja, pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan juga harus mendapatkan perlindungan.⁷⁰

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum yang mengatur keberadaan Direktur *Nominee* tidak ada diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), karena UUPT bersikap “*silent*” mengenai pengaturan Direktur *Nominee*. Namun, bukan berarti keberadaan Direktur *Nominee* dilarang dalam Perseroan di Indonesia. Dengan pengertian lain, keberadaan Direktur *Nominee* dapat dibenarkan sepanjang pengangkatan terhadap Direktur *Nominee* sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UUPT, yang tentunya diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan juga ketentuan pengangkatan sebagaimana yang dijabarkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun alasan-alasan eksistensi/keberadaan Direktur *Nominee* adalah Direktur *Nominee* itu diadakan dalam rangka mendukung kepentingan dari pihak tertentu terhadap Perseroan, misalkan Direktur *Nominee* itu ditujukan sebagai media untuk menyembunyikan status dari *beneficiary* yang sebenarnya atas Perseroan.

2. Tanggung jawab Direktur *Nominee* sama dengan tanggung jawab Direktur (yang bukan *nominee*). Sesuai dengan kewenangan yang diuraikan dalam Pasal 92 UUPT dan ditinjau lebih lanjut menurut batasan di dalam Pasal 97 UUPT (penerapan doktrin *business judgment rule*) dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Direktur (baik *nominee* atau yang bukan *nominee*) bertanggung jawab penuh atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan untuk

⁶⁹ Try Widiyono, (II), *Op. cit.*, hlm. 125.

⁷⁰ Lihat juga *Ibid.*, hlm. 50.

dan atas nama serta demi kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan prinsip bahwa Direksi sebagai *fiduciary* dari Perseroan yang berpedoman pada asas *prudent man rule* dan karenanya harus memiliki diantaranya *standard due of care*, dan *due of loyalty*.

3. Berkenaan dengan akibat hukum keberadaan Direktur *Nominee* dalam sebuah Perseroan, tentunya sama pula dengan akibat hukum dari Direktur (yang bukan *nominee*). Apa yang menjadi akibat hukum pada Direktur (yang bukan *nominee*) sesuai dengan yang ditentukan di dalam UUPT, maka itu juga merupakan akibat hukum daripada Direktur *Nominee*. Dalam hal ini, Direktur *Nominee* sama dengan Direktur (yang bukan *nominee*), harus mengelola Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta menjaga kepentingan dari *shareholders* dan juga kepentingan dari *stakeholders* Perseroan.

B. Saran

1. Berkaitan dengan ketiadaan aturan hukum yang mengatur eksistensi/keberadaan Direktur *Nominee* ini di dalam UUPT maupun peraturan terkait lainnya, maka menjadi hal yang penting dan segera diadakan suatu pengaturan lebih lanjut perihal eksistensi/keberadaan Direktur *Nominee* tersebut.
2. Perlu ada sosialisasi lebih lanjut terhadap UUPT, sehingga dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat dan (calon) Direktur mengenai bagaimana seyogianya tanggung jawab dan wewenang sebagai Direktur, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip yang berlaku umum (seperti misalnya *business judgment rule*).
3. Harus ada suatu komitmen jelas diantara Direktur *Nominee* dan pihak yang menunjuknya bahwa pengelolaan PT harus dilakukan dengan itikad baik dan semata-mata untuk kepentingan terbaik Perseroan. Sedangkan individu yang menjadi Direktur *Nominee* juga mesti memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah diantara kepentingan Perseroan dengan kepentingan *beneficiary* atau kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*, sehingga dapat menempatkan pada posisinya masing-masing secara proporsional.

V. Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Budiyono, Tri, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, St. Paul: West, 2004.
- Gogna, P.P.S., *A Textbook of Company Law*, Ram Nagar, New Delhi: S. Chand & Company Ltd., 2007.
- Griffin, Stephen, *Company Law: Fundamental Principles*, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2000.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan - Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Jakarta: Permata Aksara, 2012.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1996.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2004.
- Vagts, Detlev F., *Basic Corporation Law: Materials-Cases-Text*, New York: The Foundation Press, Inc., 1989.
- Widiyono, Try, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank & Persero)*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Widiyono, Try, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008.
- Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Bekasi: Kesaint Blanc, 2005.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Clifford S. Goldfarb, "Dual Loyalties on Non-Profit Boards: Serving Two Masters", disampaikan pada CBA-OBA National Symposium on Charity Law, 6 Mei 2011.

- Daniel L. Rottinghaus, Esq., “*A Primer on Board of Directors’ Fiduciary Duties: Knowing What is Expected Of You And Simple Tips For Complying*”, tth.
- M. Yahya Harahap, “*Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing The Corporate Veil*”, Artikel Utama pada Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 – No. 3 – Tahun 2007.
- Mary Fulton, *Responsibilities of directors in Ireland: Your questions answered*, Ireland: Deloitte & Touche, 2007.
- Nadelle Grossman, “*Director Compliance with Elusive Fiduciary Duties in a Climate of Corporate Governance Reform*”, Marquette University Law School, Faculty Publications Vol. XII, Paper 172, 2007.
- Nindyo Pramono, “Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 3, Desember 2007.
- Raffles, “Eksistensi dan Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, tth.
- Anonim, “Hartono Tanoe: Saya Bukan Pejabat SRD”, dapat diakses di http://vibizdaily.com/detail/Polhukam/2009/06/30/hartono_tanoe_saya_bukan_pejabat_srd, terakhir kali diakses pada tanggal 11 Juni 2012.
- Anonim, “Tinjauan Kritis Implementasi GCG di Indonesia”, dapat diakses di <http://legalbanking.wordpress.com/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-kapan-dapat-dilaksanakan/tinjauan-kritis-implementasi-gcg-di-indonesia/>, terakhir kali diakses pada tanggal 2 Juli 2012.
- Anonim, “*Why I need a nominee shareholder or/and nominee director?*”, dapat diakses di http://www.asiabs.com/english/english_Company_Parking_Shareholders_and_Directors_155.htm#155, terakhir kali diakses pada tanggal 30 Juni 2012.
- Anonim, “*Directors’ Responsibilities*”, dapat diakses di http://www.charlesrussell.co.uk/UserFiles/file/pdf/Mergers%20&%20Acquisitions/Directors_Responsibilities.pdf, terakhir kali diakses pada tanggal 8 September 2012.
- Anonim, “*ERISA Fiduciary Responsibility: Fiduciary Reliance on Registered Investment Advisors*”, (California, Multnomah Group Inc.), dapat diakses di <http://www.thecfdd.com/files/researchtrends/Research10.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 22 Desember 2012.
- Bryn Davis, “*Nominee Directors and Managing Conflicts in M&A Transactions: Relying on the Vibe or An Analytical Framework?*”, dapat diakses di http://www.minterellison.com/Pub/NL/201111_MAd, terakhir kali diakses pada tanggal 14 Juli 2012.
- Chandra Bowo Nagoro, “Penerapan Prinsip-Prinsip GCG pada Bank BUMN (Studi Kasus pada Bank BRI)”, dapat diakses di <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/371085057.pdf>, terakhir kali diakses pada tanggal 20 November 2012.

Diana Kusumasari, "Tercatat Sebagai Direksi/Komisaris/Manajer PT Tapi Tidak Digaji", 03 Januari 2012, dapat diakses di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0ccf5a610da/tercatat-sebagai-direksi-komisaris-manajer-pt-tapi-tidak-digaji>, terakhir diakses pada tanggal 20 Desember 2012.

Erman Rajagukguk, "Tanggung Jawab Direksi dan *"Business Judgment Rule"*", dapat diakses di <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3108512.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 18 Juni 2012.

Erwin Siregar, "Membongkar Gurita Perusahaan Milik Ibas Yudhoyono", dapat diakses di <http://sumbawanews.com/berita/membon...ibas-yudhoyono>, terakhir kali diakses pada tanggal 11 Juni 2012.

Financial Supervision Commission, "*Guidance on the responsibilities and duties of directors under the laws of the Isle of Man*", (*Isle of Man*, Agustus 2011), dapat diakses di <http://www.gov.im/lib/docs/fsc/guidanceontheresponsibilitiesand.pdf>, terakhir kali diakses pada tanggal 1 Desember 2012.

Ian M Ramsay (ed.), "*The Corporate Governance Debate and the Role of Directors' Duties*", dapat diakses di http://papers.ssrn.com/sol3papers.cfmabstract_id=924312&httppapers.ssrn.com/sol3papers.cfmabstract_id=924312, terakhir diakses pada tanggal 18 Oktober 2012.

James M. Farley, "*Could Pinnocchio Ever be a Director?*", (Canada: McCarthy Tétrault, 4 November 2008), dapat diakses di http://www.mccarthy.ca/article_detail.aspx?id=41487, terakhir diakses pada tanggal 4 Juli 2012.

Nike K. Rumokoy, "Pertanggungjawaban Perseroan selaku Badan Hukum dalam Kaitannya dengan Gugatan atas Perseroan (dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai Acuan Pembahasan)", dapat diakses di <http://repo.unsrat.ac.id/48/1/2.Nike.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 27 Juni 2012.

Priyono B. Sumbogo, "Cerita Direktur Utama Yang Divonis", *Nomor 45, Edisi 07-13 Maret 2011*, dapat diakses di <http://www.forumkeadilan.com/forum-utama.php?tid=191>, terakhir diakses pada tanggal 1 Mei 2012.

Retno Wulandari, "*Director's Responsibilities in a Limited Liability Company*", FW&P, Januari-April 2010, dapat diakses di http://franswinarta.com/Article-Director's_Responsibilities_in_a_Limited_Liability_Company.pdf, terakhir kali diakses pada tanggal 1 November 2012.

Susan Watson & Chris Noonan, "*The corporate shield: What happens to directors when companies fail?*", *Business Review* (University of Auckland, 2005), dapat diakses di <http://www.uabr.auckland.ac.nz/files/articles/Volume11/v11i1-the-corporate-shield.pdf>, terakhir kali diakses pada tanggal 12 Oktober 2012.

Sutan Remy Sjahdeini, "Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi & Komisaris BUMN Persero", dapat diakses di

<http://sremys.com/artikel/Tugas,Wewenang,%20Dan%20Tanggung%20Jawab%20Direksi%20&%20Komisaris%20BUMN%20Persero.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 15 Mei 2012.

The Companies and Securities Law Review Committee, "*The Duties and Liabilities of Nominee Directors and Alternate Directors: Discussion Paper No. 7*", dapat diakses di http://www.takeovers.gov.au/content/Resources/cslrc/cslrc_discussion_paper_no_7.aspx, terakhir kali diakses pada tanggal 2 Juli 2012.

V. Umakanth, "*Stock Options for Nominee Directors*", 6 Agustus 2008, dapat diakses di <http://indiacorplaw.blogspot.com/2008/08/stock-options-for-nominee-directors.html>, terakhir kali diakses pada tanggal 21 November 2012.

Yahya A.Z., "Perbandingan Hukum Tanggung Jawab Direktur (PT) Antara Sistem Hukum *Civil Law* dengan *Common Law*", 21 Juli 2009, dapat diakses di <http://yahyazein.blogspot.com/2009/07/perbandingan-hukum-tanggung-jawab.html>, terakhir diakses pada tanggal 01 Desember 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Pasal 26 tentang Pedoman Jabatan Rangkap, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, tth.